

BAB VI RINGKASAN

Pengelolaan hutan secara lestari merupakan salah satu target dalam Sustainable Development Programs (SDGs). Kawasan konservasi merupakan sumber hidrologi, daerah tangkapan air, pemasok air bagi daerah aliran sungai, penjaga dan pengembang *biodiversity* bagi flora dan fauna, penyedia jasa lingkungan dan *ekotourisme* (Nugroho dkk, 2012). Kelestarian taman nasional sebagai suatu ekosistem sumberdaya alam sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi dan perkembangan perilaku sosial ekonomi masyarakat yang berada di sekitarnya (Wahyuni dan Mamonto, 2012), disamping secara internal dipengaruhi oleh masalah keterbatasan sumber daya, yang antara lain sumber daya manusia (kualitas dan kuantitas), sarana prasarana (sarpras) dan dana pengelolaan Wiratno (2009). Balai Taman Nasional sebagai ujung tombak pengelolaan taman nasional harus mendorong terwujudnya *grand design* atau perencanaan menyeluruh serta pembahasan mengenai rencana pengelolaan taman nasional yang memaduserasikan program seluruh *stakeholders* yang terintegrasi dalam rencana pembangunan khususnya di daerah, untuk itu diperlukan dukungan yang kontinyu dan komprehensif dari pemerintah daerah (Gunawati, 2017).

Dalam penelitiannya Alkaf *et al.* (2014) menyampaikan bahwa perubahan penggunaan lahan pada periode 2001-2013 adalah pengurangan luasan hutan, rumput dan perkebunan campuran, diikuti dengan peningkatan luasan semak, pemukiman dan ladang. Laju deforestasi di dalam kawasan TNGMb yang terjadi terutama diakibatkan oleh kebakaran hutan di dalam kawasan. Gunawan *et al.* (2013) menyatakan bahwa masyarakat 13 desa yang berbatasan dengan TN Gunung Merbabu di wilayah Boyolali memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya hutan melalui pengambilan kayu bakar pakan ternak dan air untuk kebutuhan rumah tangga. Untuk mengurangi konflik dan tekanan kawasan serta meningkatkan fungsi taman nasional bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya maka pihak pengelola TNGMb melakukan berbagai upaya. Selain partisipasi aktif dari masyarakat seperti yang disampaikan Sugito (2015), upaya lain diantaranya penataan zonasi, pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan

melalui pembentukan Model Desa Konservasi (MDK) serta pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam (Balai TNGMb, 2018). Hal tersebut perlu mendapat perhatian dan dukungan tidak hanya pengelola kawasan namun juga integrasi peran lembaga-lembaga terkait.

Pengelolaan kawasan hutan konservasi secara kelembagaan dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/ OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional. Tugas pokoknya TNGMb yaitu melakukan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta pengelolaan kawasan taman nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Balai TNGMb, 2018). Dalam pengelolaannya kawasan TNGMb telah mengalami perkembangan seiring dengan kondisi masyarakat yang sangat dinamis sehingga mendorong untuk dilakukan zonasi atau pembagian zona sesuai fungsi dan pemanfaatannya sesuai SK Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE) Nomor: SK.417/KSDAE/SET/KSA.0/11/2017 tentang zonasi TNGMb. Dalam pengelolaannya TNGMb tetap mempertahankan fungsinya sebagai sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan TNGMb. Kawasan TNGMb juga memiliki nilai penting dimana banyak potensi wisata alam dan budaya masyarakat yang dapat dikembangkan. Jenis wisata populer dan telah lama berkembang di TNGMb berupa wisata pendakian. Pelestarian kawasan konservasi diharapkan dapat dilakukan secara terpadu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. P19/ Menhut-II/2004 tentang Pengelolaan Kolaboratif. Setiap lembaga terkait dapat berperan serta karena pelaksanaan pelestarian jenis akan mencakup kepentingan banyak pihak dan berbagai lembaga. Koordinasi dan konsolidasi antar lembaga terkait tentunya perlu lebih

ditingkatkan untuk menciptakan program dan peranan yang terintegrasi (Kuswanda W dan Bismark M, 2007).

Metode penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif digunakan dalam menentukan persepsi dan peran kelembagaan sedangkan analisis SWOT digunakan dalam penentuan strategi konservasi terintegrasi antar kelembagaan dalam mendukung pelestarian kawasan TNGMb. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan yang ada di Pemda, POLRI, swasta, dan kelompok masyarakat di Kabupaten Boyolali memiliki persepsi yang baik tentang kawasan TNGMb yaitu terkait potensi sumber daya alam dan pengelolaan kawasan di TNGMb dengan prosentase sebesar 73,91%. Peranan *stakeholder* lembaga dalam mendukung pelestarian TNGMb masih tergolong rendah dengan rata-rata sebesar 65,89% baik dalam aspek konservasi/ lingkungan, sosial budaya, ekonomi maupun organisasi. Keterlibatan hanya sebatas pelibatan program dan kegiatan yang merupakan implementasi kebijakan pengelolaan TNGMb yang bersumber pada anggaran APBN Kementerian LHK melalui Balai TNGMb, dan belum memadukan program antar sektor yang diinisiasi dan dianggarkan oleh masing-masing lembaga. Strategi peran terintegrasi antar kelembagaan dalam mendukung pengelolaan TNGMb yaitu (1) Mensinergikan kebijakan dan program pembangunan di daerah penyangga TNGMb dengan pengelolaan kawasan TNGMb; (2) Mengintegrasikan pengelolaan potensi wisata di dalam dan luar kawasan berbasis masyarakat melalui pengembangan tata ruang wisata daerah; (3) Pembentukan forum multisektoral dalam mendukung pengelolaan kawasan TNGMb dan sekitarnya; (4) Mitigasi gangguan atau bencana kawasan TNGMb secara kolaboratif; (5) Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan TNGMb dengan melibatkan *stakeholder* lembaga terkait; (6) Inventarisasi potensi di dalam dan luar kawasan serta penyusunan desain tapak wisata alam di zona pemanfaatan melibatkan masyarakat; (7) Pengembangan kawasan penyangga TNGMb; (8) Peningkatan sadar lingkungan kawasan TNGMb lintas sektor; (9) Pengaktifan kembali forum pemanfaat air dalam TNGMb; (10) Peningkatan kapasitas SDM *stakeholder* mitra demi pengelolaan kawasan yang efektif.

